



The Influence Of Government Accounting Standards And Financial Report Quality On Government Performance Accountability Kecamatan Secanggang

1) Silvi Dwi Utari ,2) Oktarini Khamilah Siregar ,3) Agus Tripriyono

1,2) Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: 1) silvidwiutari@gmail.com ;2) oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id

3) agustripriyono@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Januari 2026]

Revised [02 April 2026]

Accepted [07 April 2026]

KEYWORDS

Government Accounting Standadst, Financial Reports, Performance Accountability.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Desa Kecamatan Secanggang. Populasi dalam penelitian ini diambil dari perangkat Desa Kecamatan Secanggang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling dengan total* sebanyak 51 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini membahas variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel bebas dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel terikat. Hasil penelitian setelah dianalisa dengan menggunakan SmartPLS 4 menunjukkan bahwa Standar akuntansi pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan nilai original sample 0.432 (positif), nilai T-Statistic konstruk adalah sebesar 4.808 (>1.96) dan nilai p values yaitu 0.000(<0.05) Kualitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan nilai original sample 0.532(positif), nilai T-Statistic konstruk adalah sebesar 5.969 (>1.96) dan nilai p values yaitu 0.000(<0.05). Standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 82,321 dan p value jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Government Accounting Standards and the quality of financial reports on the accountability of the performance of the Secanggang District Village government. The population in this study was taken from the Secanggang District Village apparatus. The sampling technique in this study used *purposive sampling* with a total of 51 respondents. The analysis method used in this study discusses the independent variables against the dependent variable. The variables in this study are government accounting standards, and the quality of financial reports as the independent variable and government performance accountability as the dependent variable. The results of the study after being analyzed using SmartPLS 4 show that government accounting standards have a significant effect on government performance accountability, this is indicated by the original sample value of 0.432 (positive), the construct T-Statistic value is 4.808 (> 1.96) and the p-value is 0.000 (<0.05). The quality of financial reports has a significant effect on government performance accountability, this is indicated by the original sample value of 0.532 (positive), the construct T-Statistic value is 5.969 (> 1.96) and the p-value is 0.000 (<0.05). Government accounting standards and the quality of financial reports have a simultaneous effect on performance accountability, as indicated by the calculated F value of 82.321 and the p-value is much smaller than 0.05, namely 0.000 <0.05.

PENDAHULUAN

Tingginya harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik semakin kuat dirasakan, terlebih semakin kritisnya masyarakat terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kondisi ini sudah semestinya di respon baik oleh Pemerintah yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Seiring dengan adanya peranan pemerintah (Government) menjadi pemerintahan (governance) yang lebih baik memberikan peran kepada masyarakat dalam hal ini yaitu melalui Pemerintah Desa.

Kepemerintahan yang baik sebagai konsep sebenarnya bukanlah hal yang baru. Konsep governance (Hendrik Latief et al., 2023) di definisikan sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya, tetapi juga menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian untuk mencapai tujuan daerah sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan. Upaya pemerintah terus melakukan yang terbaik.

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*) salah satunya di tandai dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tinggi, yang dalam hal ini adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat reformasi Birokrasi ,untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia/Presiden Republik Indonesia, 2014). Dalam rangka meningkatkan Pemerintahan yang baik, pemerintah telah mewajibkan setiap entitas pemerintahan baik pemerintah daerah dan desa, di tuntut untuk transparan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketetapan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (BPK, 2010) yang dirancang sebagai standar baku dalam menyusun laporan keuangan sektor publik yang berorientasi akrual guna menghasilkan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Tuntutan tersebut tidak hanya pada Pemerintah Pusat maupun Daerah melainkan juga pada Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa merupakan lembaga pelayanan publik yang diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk melayani masyarakat. Dalam Pemerintah Desa upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sangat perlu diperhatikan, dengan melihat indikator pendukung untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja, hal itu diharapkan memberikan tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pemerintah Desa adalah sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di tingkat desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Otonom, 2024) menyebutkan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberikan wewenang untuk mengelola keuangan di Desa dengan mengalokasikan, menyusun, melaporkannya Dana Desa tersebut tepat guna dan sasaran sesuai dengan ketetapan pemerintahan.

Dalam pengalokasian, menyusun dan melaporkan keluar masuknya Dana Desa, Pemerintah Desa di tuntut untuk melaporkan sesuai dengan standar baku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, dalam penerapannya Standar Akuntansi Pemerintah diyakini memberikan dampak meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, artinya bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang sesuai, menjadikan informasi keuangan yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Selain penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas laporan keuangan bisa memberi pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, karakter kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normative yang harus diwujudkan di informasi akuntansi hingga bisa menggapai tujuannya.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah dalam manajemen tata kelola organisasi atau pengelola kepentingan yang bertindak bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan.(Riyani & Widajantie, 2022) Teori Stewardship ini sejalan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah sebagai steward memiliki tugas melayani public, memiliki wewenang dan juga mensejahterakan masyarakat(Riyani & Widajantie, 2022). Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, serta mampu membuat pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan serta mengungkapkan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal(Dea Juliani & Yunita, Nur Afni, 2024).

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi pedoman penting dalam pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Standar Akuntansi Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan (Dian Armada, Rahima Br Purba, 2025). Penelitian (Peilouw et al., 2023) instansi pemerintah Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Penelitian (G. H. Putra & Fitri, 2024) Kota Padang menyimpulkan bahwa dalam penelitiannya penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian (Rachman et al., 2023) masih terdapat Desa yang belum menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik Desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan(Rachman et al., 2023).



Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan adalah kemampuan suatu laporan keuangan yang dalam penyajiannya menyajikan informasi yang benar, wajar, akurat dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan, kinerja, maka dalam setiap membuat laporan keuangan harus memenuhi kriteria atau sesuai karakteristik laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang mencakup relevan artinya informasi yang termuat di dalamnya dapat digunakan dalam mengambil keputusan oleh pemangku, Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, Dapat dibandingkan artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya dan dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan bentuk serta istilah disesuaikan dengan pemahaman para pengguna dengan aturan yang telah diterapkan supaya laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya dan akurat. sehingga dapat digunakan dalam mengambil keputusan para pemangku kepentingan, guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup (Sultan, 2021)

Penelitian (Widayati & Abdurahim, 2022) Pemerintah Desa Kabupaten Gunungkidul menemukan bahwa masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan terjadinya pencatatan pengeluaran ganda dengan dana desa, hal tersebut terjadi karena kurangnya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut. Kata Penelitian (Keuangan & Daerah, 2020) Kota Pekanbaru menyatakan Kualitas laporan keuangan pemerintah berhubungan erat dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan- aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akutabilitas Kinerja Pemerintah Adalah instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi (Asmawanti et al., 2020). Menurut (Israr & Syofyan, 2022) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi yang bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang diamanahkan kepada mereka dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. (Hendrik Latief et al., 2023) Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Indonesia dilaksanakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai SAKIP, yang diawali dengan adanya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Suatu daerah dikatakan efektif dan efisien dalam melaksanakan anggaran program dan kegiatannya bila memiliki capaian akuntabilitas dengan kategori baik. Penelitian (Peilouw et al., 2023) penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian penerapan akuntansi sektor publik mempengaruhi kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, dan sebagian kualitas laporan keuangan mempengaruhi kinerja akuntabilitas instansi pemerintah. Sementara itu, penerapan simultan Akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja akuntabilitas lembaga pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, penelitian asosiatif adalah penelitian korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya (Mahfuz & Hanum, 2023) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara objektif menggunakan data numerik dan alat statistik. Sementara itu, pendekatan asosiatif digunakan karena penelitian ini ingin menguji sejauh mana Standar Akuntansi Pemerintah dan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai perangkat desa berjumlah 154 orang dan Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 orang (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara) yang bertugas pada bidang akuntansi di Intansi Pemerintah Desa, alasan penggunaan sampel yaitu staff yang ikut serta dalam menyusun laporan keuangan, Karakteristik utama dari populasi ini mencakup aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Metode pengambilan sampel memakai *Non-probability sampling* yang memakai *purposive sampling* yaitu bertujuan memperoleh sampel yang representative sesuai kriteria pegawai perangkat desa yang terlibat dalam pelaporan dan penyusunan keuangan instansi pemerintah desa Kecamatan Secanggang, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuantitative dengan alat bantu seperti kuesioner tertutup. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, yang bersumber dari responden pegawai perangkat desa Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang telah dijabarkan dalam definisi operasional. Setiap item pertanyaan akan menggunakan skala Likert 5 poin untuk menangkap tingkat persepsi responden terhadap variabel yang diteliti, dari skala "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju" teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik kuantitatif dengan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan kompleks antar variabel laten (SAP, Laporan Keuangan, Akuntabilitas), Selain itu, PLS-SEM cocok digunakan pada ukuran sampel kecil hingga menengah Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

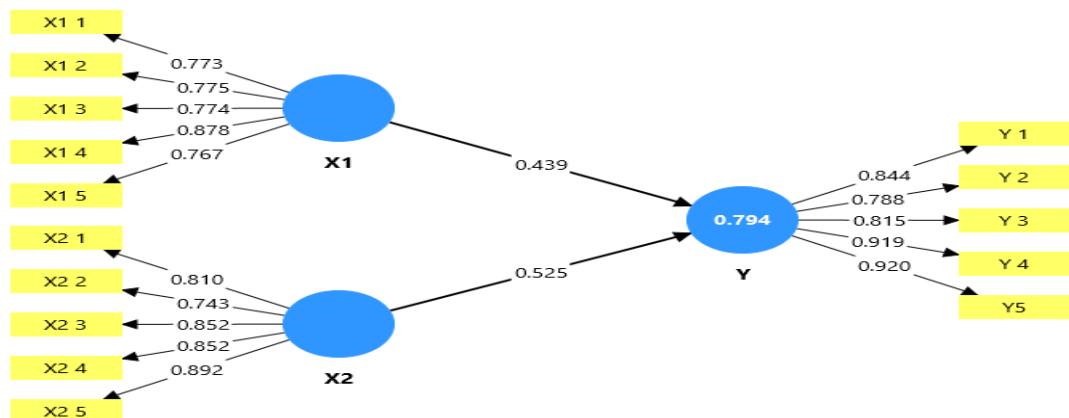
Langkah-langkah analisis data diawali dengan pengujian kualitas data, yang mencakup uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan nilai *outer loading*, *Average Variance Extracted* (AVE), dan *Composite Reliability* (CR). Selanjutnya, dilakukan pengujian model struktural (*inner model*) untuk melihat nilai path coefficient, R² (koefisien determinasi), dan uji t-statistik menggunakan teknik bootstrapping. Analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi terbaru, yang dirancang khusus untuk pemodelan jalur dengan pendekatan PLS-SEM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan structural equation modelling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Smart PLS versi 4 yang dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan structural dengan basis variance. Adapun bentuk diagram jalur perancangan outer model dan inner model dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Outer Model dan Inner Model



Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Pengujian *Outer Loading* (Model Pengukuran)

Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan pada korelasi antara komponen/item skor yang diestimasi menggunakan software SmartPLS 4.0 ukuran refleksi dikatakan tinggi apabila berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Menurut (R.



Putra, 2021) dalam penelitian tahap awal ukuran reflektif dikatakan tinggi apabila berkolasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading faktor 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup.

Tabel 1 Nilai Outer loading

Variabel	Indikator	X1	X2	Y
Standar Akuntansi Pemerintah	X1-1	0,773		
	X1-2	0,775		
	X1-3	0,774		
	X1-4	0,878		
	X1-5	0,767		
Kualitas Laporan Keuangan	X2-1		0,810	
	X2-2		0,743	
	X2-3		0,852	
	X2-4		0,852	
	X2-5		0,892	
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Y-1			0,844
	Y-2			0,788
	Y-3			0,815
	Y-4			0,919
	Y-5			0,920

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan PLS 4 yang disajikan pada tabel 1 Diketahui bahwa semua indikator pada penelitian ini nilai outer loading nya berada diangka $> 0,70$. Indikator yang memiliki nilai outer loading $> 0,70$ diartikan bahwa indikator pada variabel tersebut dinyatakan memenuhi syarat *Convergent Validity* dalam kategori memadai dan baik, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan untuk tahap pengujian validitas berikutnya.

Construct Reability

Dalam mengukur konsistensi internal alat ukur pada PLS 4 dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas. Menurut (Yasin, 2024) yang diukur dengan 3 kriteria yaitu *Cronback's Alpha* (CA), *Composite Reliability* (CR), dan *Average Variance Extracted* (AVE). Pada pengujian reliabilitas menunjukan ketepatan, konsistensi suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran, dimana reliabilitas akan mengacu pada instrument yang dianggap dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Berikut disajikan nilai *composite reliability* untuk masing-masing variabel:

Tabel 2 Composite Reability

Variabel	Composite reliability
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,863
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0,897
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0,915

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Suatu variabel diakui teruji atau reliabel jika memiliki nilai composite realibility diatas 0,7, Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 2, ditarik kesimpulan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai composite realibility lebih besar dari 0,7. Seluruh indikator memiliki kekonsistenan dalam mengukur keempat variabel penelitian.

Berikut disajikan nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing masing variabel:

Tabel 3 Cronbach' Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,854
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0,888
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0,910

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Suatu variabel dinyatakan teruji atau reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 3, ditarik kesimpulan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach' Alpha* lebih besar dari 0,7. Seluruh indikator memiliki kekonsistenan dalam mengukur tiga variabel

Tabel 4 Rata-Rata Varians Diekstrak (AVE)

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,631
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0,691
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0,738

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Suatu variabel dinyatakan teruji atau reliabel apabila memiliki nilai AVE minimal 0,5. Berdasarkan data yang dihasilkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai AVE seluruh variabel lebih dari 0,5 sehingga semua variabel dinyatakan reliabel. Semua indikator dapat mencerminkan ketiga variabel yang diukur.

R-Square (R²)

Adapun nilai pada R-Square dicantumkan untuk melihat bagaimana besar dampak dari variabel laten bebas terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 5. Tabel Hasil Uji R-Square

Y	R-square	R-square adjusted
	0,794	0,786

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Berdasarkan tabel 5 disimpulkan nilai R-Square untuk variabel laten akuntabilitas kinerja pemerintah sebesar 0,794 yang menunjukkan variabilitas standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan memiliki dampak sebesar 0.786 atau setara 78,6% pada akuntabilitas kinerja pemerintah.

Effect Size (F-Square)

Nilai F-Square (F²) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel predictor (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai F-Square berkisar antara $0.02 \leq F^2 < 0.15$ mengindikasikan bahwa variabel berpengaruh lemah, $0.15 \leq F^2 < 0.35$ mengindikasikan bahwa variabel berpengaruh sedang, dan $F^2 \geq 0.35$ mengindikasikan bahwa variabel berpengaruh tinggi

Tabel 6 Hasil Uji F-Square

Standar Akuntansi Pemerintah (X1) → Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0,469
Kualitas Laporan Keuangan (X2) → Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0,672

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, F² variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) (0,469) berpengaruh tinggi, Kualitas Laporan Keuangan (X2) (0,672) berpengaruh tinggi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam model structural.

Uji Parsial

Dalam Evaluasi Model dilakukan dengan melihat signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel melalui prosedur Bootstrapping. Uji Hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-statistics dan nilai P Values. Hipotesis pada Penelitian ini dapat dinyatakan diterima apabila hasil sesuai dengan *Rule of Thumb*, jika p value dibawah 0,05 lalu t-statistic 1,96. nilai Signifikansi yang dapat digunakan (*one-tailed*) t-value 1.96 (Signifikansi level =5%). Evaluasi Model Perhitungan Statistik dengan *Bootstrapping* pada SmartPls 4 Sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Hubungan	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P value
X1 → Y	0,432	0,429	0,090	4,808	0,000
X2 → Y	0,532	0,525	0,089	5,969	0,000

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025



Berdasarkan tabel diatas diperoleh keterangan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- 1) Pengujian H1 pada model structural menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Berdasarkan nilai original sample 0.432 (positif), nilai T-Statistic konstruk adalah sebesar 4,808 (>1.96) dan nilai p values yaitu 0.000(<0.05) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 diterima.
- 2) Pengujian H2 pada model structural menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Berdasarkan nilai original sample 0.532 (positif), nilai T-Statistic konstruk adalah sebesar 5,969 (>1.96) dan nilai p values yaitu 0.000(<0.05) menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 diterima.

Uji Simultan

Uji simultan dilakukan dengan melihat nilai P Values. Hipotesis pada Penelitian ini dapat dinyatakan diterima apabila hasil sesuai dengan *Rule of Thumb*, jika p value dibawah 0,05. Evaluasi Model Perhitungan Statistik dengan *Bootstrapping* pada SmartPLS 4 Sebagai berikut:

Tabel 8. Summary Anova

	Sum square	df	Mean square	F	p value
Total	545,647	50	0,000	0,000	0,000
Error	123,170	48	2,566	0,000	0,000
Regression	422,477	2	211,238	82,321	0,000

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS 4, 2025

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa p value jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 $<$ 0,05, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Maka hipotesis sebelumnya adalah hipotesis diterima.

Pembahasan

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil Analisa menggunakan smartPLS 4 diketahui bahwa standart akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini diperoleh berdasarkan nilai original sampel yang menunjukkan angka positif, dan nilai t statistic konstruk lebih besar dari > 1.96 nilai p values yang artinya Standar Akuntansi Pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis H1 diterima. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil kuisioner menyatakan bahwa instansi terkait telah melakukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik dan telah disertai bukti pendukung serta pencatatan dilakukan secara berurutan sesuai dengan kronologi, namun proses klasifikasi/pengelompokkan pada setiap transaksi yang terjadi di instansi terkait belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa instansi terkait perlu meningkatkan kompetensi pegawai secara professional dibidang akuntansi. Peningkatan profesionalisme SDM bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan akuntansi atau melakukan sosialisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Sehingga tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja suatu organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Peilouw et al., 2023) yaitu penerapan akuntansi sektor publik Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, dan fungsi dan obyek pengeluaran secara transparan.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil Analisa menggunakan smartPLS 4 melalui pengujian model structural menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah,

nilai ini diperoleh hasil dari nilai *t* sampel yang menunjukkan angka positif dan *T*-statistic konstruk lebih besar >1.96 serta nilai *p* values lebih kecil dari <0.05 yang artinya bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, dan hipotesis 2 diterima.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya laporan keuangan yang dan berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dibuat. Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu dengan baik, namun laporan keuangan yang dihasilkan belum menyajikan informasi keuangan yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa instansi terkait perlu melakukan pengawasan dan evaluasi dengan standar akuntansi yang berlaku secara lengkap dan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Widayati & Abdurahim, 2022) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas secara teori penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Penelitian (Oktavianto, 2023) menegaskan bahwa informasi keuangan pemerintahan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas dan terus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih baik dan maksimal.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji simultan dilakukan dapat dilihat bahwa nilai *P Values* jauh lebih kecil dari 0.05 yaitu dengan nilai 0.00 kurang dari 0.05 maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, maka hipotesis sebelumnya dapat diterima.

Hasil penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, hal ini menunjukkan apabila akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dalam hal ini penerapannya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan tahun selanjutnya dengan baik, namun pada pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal dan proses penyampaian laporan akuntabilitas kinerja disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir juga belum dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa instansi terkait perlu memperbaiki proses pengukuran kinerja dan meningkatkan proses penyampaian laporan akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian (Peilouw et al., 2023) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengaruh standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang semakin baik pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan nilai Berdasarkan nilai original sample positif (positif), nilai *T*-Statistic konstruk lebih besar (>1.96) dan nilai *p* values yaitu kurang dari (<0.05). Dengan demikian diterima hipotesis ini berarti semakin tinggi standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh Instansi Pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil kuisioner menyatakan bahwa instansi terkait telah melakukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik dan telah disertai bukti pendukung serta pencatatan dilakukan secara berurutan sesuai dengan kronologi, namun proses klasifikasi/pengelompokkan pada setiap transaksi yang terjadi di instansi terkait belum optimal dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten dan periodik belum dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Peilouw et al., 2023).



2. Kualitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan nilai original sample positif, nilai T-Statistic konstruk adalah lebih besar (>1.96) dan nilai p values yaitu kurang dari (<0.05). maka variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan diterima hipotesis ini berarti semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu dengan baik, namun laporan keuangan yang dihasilkan belum menyajikan informasi keuangan yang lengkap. Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini sejalan penelitian (Widayati & Abdurahim, 2022) dan Penelitian (Oktavianto, 2023)
3. Standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 82,321% dan p value jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, Hal ini berarti bahwa ada pengaruh secara simultan antara standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil kuisioner juga menyatakan bahwa instansi terkait telah menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan tahun selanjutnya dengan baik, namun pada pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal dan proses penyampaian laporan akuntabilitas kinerja disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir juga belum dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dalam hal ini penerapan akuntansi sector public maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian (Peilouw et al., 2023).

Saran

1. Peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah dapat dilakukan dengan meningkatkan meningkatkan pengetahuan pegawai dan pejabat-pejabat di Lingkungan pemerintah tentang penyusunan laporan sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar, sehingga dapat menyusun, mengklasifikasikan akun dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan dalam hal ini konsisten dan periode melakukan pelaporan keuangan dapat meningkat dan berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan, instansi terkait mencatat dan menuliskan transaksi yang terjadi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku secara lengkap dan mencakup informasi yang akurat, dapat dipahami, dan di bandingkan pada periode sebelumnya sehingga informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen setiap pimpinan instansi serta unit kerja dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Kepada peneliti selanjutnya Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dea Juliani, H. R., & Yunita, Nur Afni, I. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pengawasan Kualitas Laporan

- Keuangan Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(3), 370–385.
- Dian Armanda, Rahima Br Purba, R. M. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12 Suppl 1(9), 225–241. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918515%0Ahttp://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083217094>
- Hendrik Latief, Syachrumsyah Asri, & Agus Santosa. (2023). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Paser. *Journal Publicuho*, 5(4), 1367–1376. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550>
- Keuangan, L., & Daerah, P. (2020). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*. 10(1).
- Mahfuz, R. P., & Hanum, Z. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal). *Owner*, 7(4), 2895–2904. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1626>
- Oktavianto, M. R. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), 994–1001. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2542>
- Otonom, D. (2024). *yang dibentuk untuk*.
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 111–112. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641>
- Pemerintah Republik Indonesia/Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). *Republik Indonesia*, 1–18.
- Putra, G. H., & Fitri, V. A. (2024). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4255–4268. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6757>
- Putra, R. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Karyawan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Pt.Sawah Solok. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 989–1001. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.767>
- Rachman, D., Sofwan, S. V., & Amelia, S. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari). *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 14(02), 134–150.
- Riyani, A. A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 477–486.
- Sultan, I. F. (2021). Pengaruh Kompensasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Dimediasi oleh Motivasi Karyawan PT. Trikarya Cemerlan (TKC) pada Nipah Mall Makassar. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 340–354. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.234>
- Widayati, W., & Abdurahim, A. (2022). Determinan yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.30595/ratio.v3i2.14361>
- Yasin, R. A. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Puulemo Kec. Baula TA 2022. ... *Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial*, x. <https://ejournal.teraskampus.id/index.php/simetris/article/view/64%0Ahttps://ejournal.teraskampus.id/index.php/simetris/article/download/64/56>